LAPORAN

SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
KOTA LHOKSEUMAWE
DESEMBER 2019

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Lhokseumawe
Pada Hari Senin, 30 Desember 2019

Top Management,

TEUKU SYARAFI, SH., MH
NIP. 197601071997031005

Sekretaris Tim Survei

SHINTA MIRANDA SORAYA,SH.
NIP. 198502152005022001

Ketua Tim Survei

MUKHLIS, SH.
NIP. 196812311995031013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofidasaryang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal persepsi korupsi bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi korupsi yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh transparansi biaya, peraturan dan transaksi tentang perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Lhokseumawe, Desember 2019

Tim Survei

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud Dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Rencana Kerja 3
BAB II 5
METODOLOGI 5
2.1. Metode Penelitian 5
2.2. Populasi dan Sampel 5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control 6
2.5. Teknik Analisis Data 6
2.6. Tahapan Pelaksanaan 7
BAB III 9
PROFIL RESPONDEN 9
3.1. Profil Responden 9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Perindikator 11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan 16
3.4. Persepsi responden terhadap Kualitas pelayanan satuan kerja pada Pengadilan 17
BAB IV 17
PENUTUP 17
4.1. Kesimpulan 18
4.2. Rekomendasi 18

LAMPIRAN 19

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Model Alur Penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas	7
Tabel 2	Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi	8
Tabel 3	Nilai Persepsi	8
Tabel 4	Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin Responden	9
Tabel 5	Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 6	Jenis Pekerjaan Responden	10
Tabel 7	Usia Responden	10
Tabel 8	Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	11
Tabel 9	Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	11
Tabel 10	Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	12
Tabel 11	Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya	12
Tabel 12	Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia	13
Tabel 13	Indeks Pada Indikator Tambahan Biaya	13
Tabel 14	Indeks Pada Indikator Hadiah	14
Tabel 15	Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran	14
Tabel 16	Indeks Pada Indikator Percaloan	15
Tabel 17	Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	15
Tabel 18	Indeks Pada Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	16
Tabel 19	Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	16
Tabel 20	Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara

pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  a. Kuesioner.
  b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  a. Jumlah Responden.
  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Datapendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian

dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

s

1.4.3. **Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu kurang dari 6 (enam) bulan atau data 108 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

PROFIL RESPONDEN

3.1. Profil responden

3.1.1. Jenis Kelamin

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari jenis kelamin pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas adalah perempuan sebanyak 65 orang sedangkan laki-laki sebanyak 43 orang.

Tabel 4.

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

No	Klarifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Laki-laki	43	39,81
2	Perempuan	65	60,19
Jumlah		108	100

(Sumber Data: Data Diolah)

3.1.2. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar SMA / Sederajat sebanyak 54 orang dan sarjana sebanyak 29 orang sedangkan Diploma sebanyak 13 orang, SMP / Sederajat sebanyak 7 orang, Pasca Sarjana sebanyak 3 orang, dan SD/ sederajat sebanyak 2 orang.

Tabel 5.

Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klarifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	SD	2	1,85
2	SMP	7	6,48
3	SMA	54	50,00
4	Diploma	13	12,04
5	Sarjana	29	26,85
6	Pasca Sarjana	3	2,78
Jumlah		108	100

(Sumber Data: Data Diolah)

3.1.3. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 56% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe memmemiliki pekerjaan sebagai Pelajar / Mahasiswa.

Tabel 6.

Jenis pekerjaan responden

No	Klarifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase (%)
1	PNS	11	10,19
2	TNI / POLRI	1	0,93
3	Pegawai Swasta	4	3,70
4	Wiraswasta	18	16,67
5	Ibu rumah tangga	27	25,00
6	Mahasiswa/Pelajar	35	32,41
7	Tani / Nelayan	4	3,70
8	Pedagang	8	7,41
Jumlah		108	100

(Sumber Data: Data Diolah)

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 22 tahun s/d 50 tahun yaitu sebanyak 84 responden. Bagi kelompok usia di atas 51 tahun, jumlah responden semakin mengecil yaitu 5 responden, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun sebanyak 19 responden.

Tabel 7

Usia responden

No	Klarifikasi Responden Berdasarkan Usia	Frekuensi	Prosentase (%)
1	≤ 21 tahun	19	4,63
2	22 s/d 50 tahun	83	77,78
3	≥ 51 tahun	19	17,59
Jumlah		108	100

(Sumber Data: Data Diolah)

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,90.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe BERSIH darimanipulasi peraturan

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

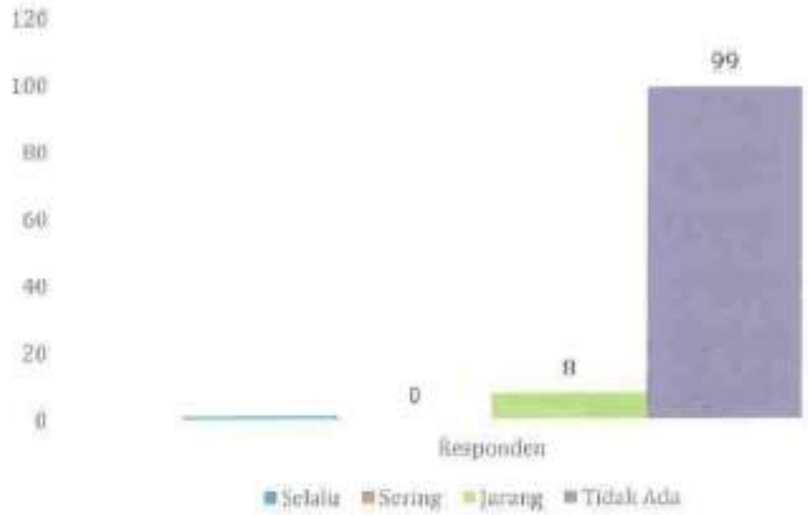

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4,hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,88,dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada pengadilan Negeri Lhokseumawe BERSIH dari penyalahgunaan jabatan

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

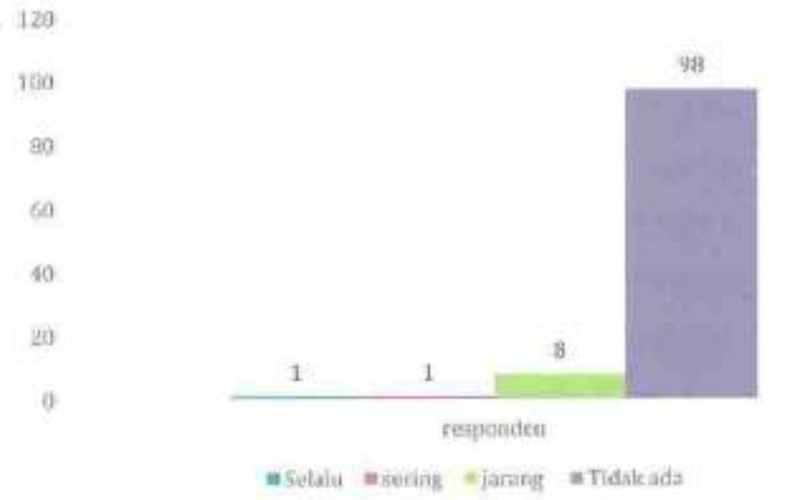

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah BERSIH dari tindakan Menjual Pengaruh.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

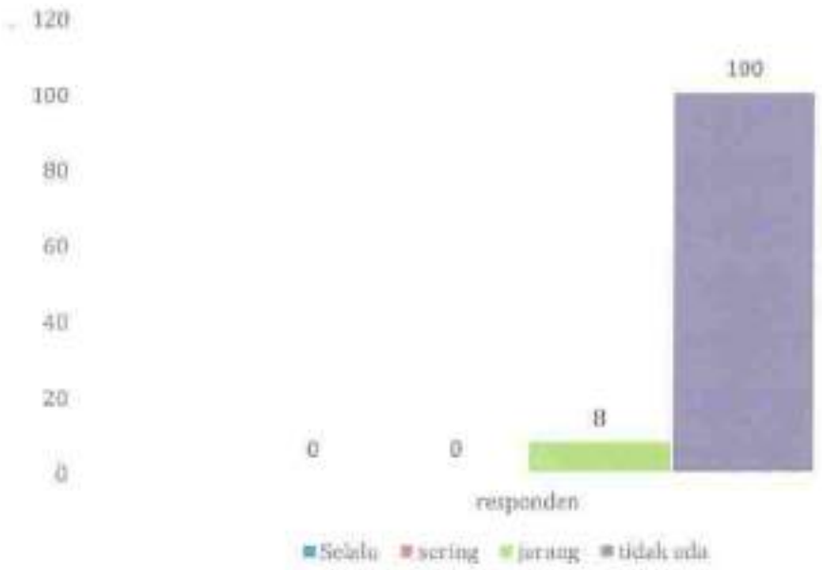

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,83.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah BERSIH dari Transasksi Biaya.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transaksi biaya

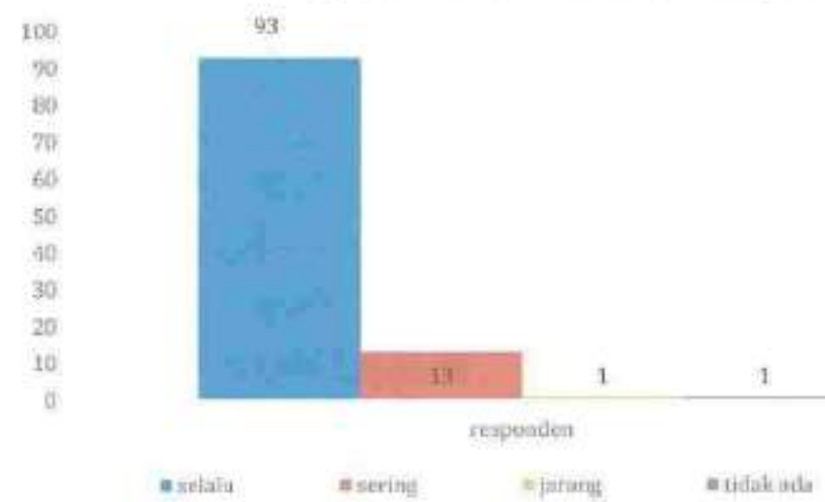

3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,93

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,81.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah BERSIH dari biaya tambahan.

Tabel 13.

Indeks pada indikator tambahan biaya

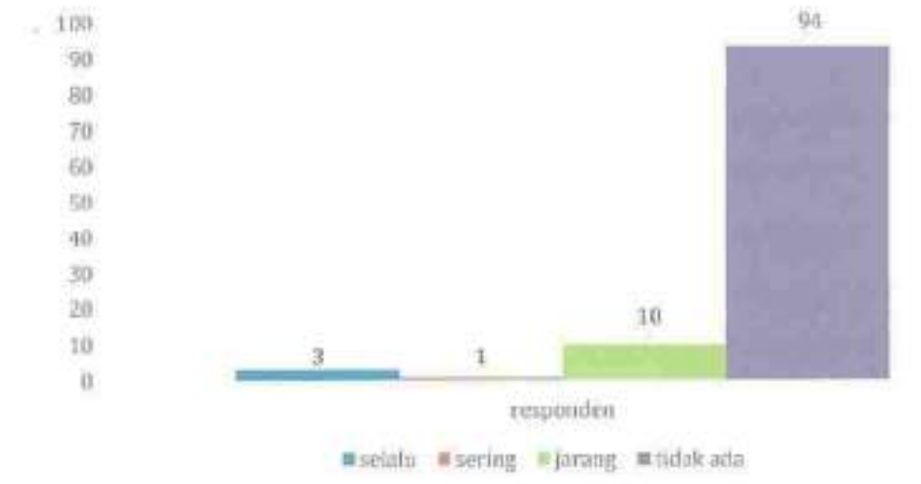

3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,93.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah BERSIH dari penerimaan hadiah

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah

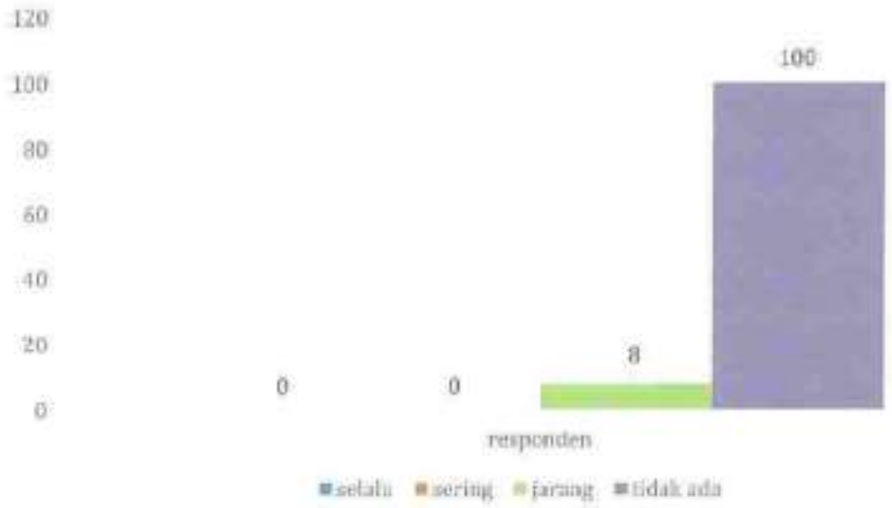

3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,89.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah BERSIH dari Transparansi Biaya.

Tabel 15.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

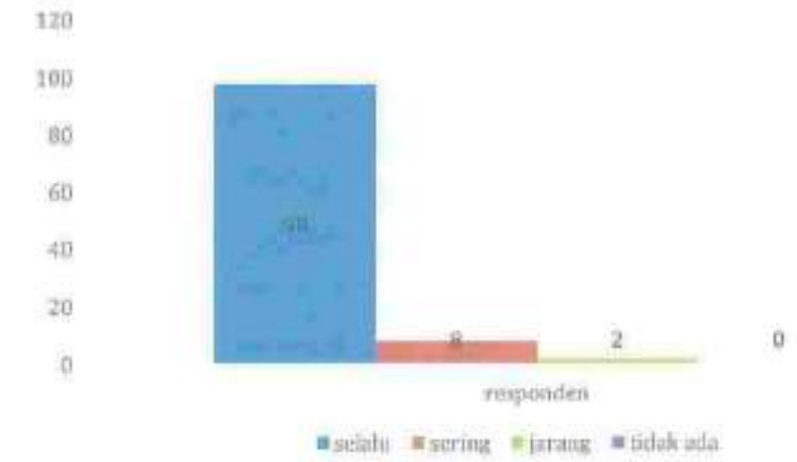

3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,77

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah BERSIH dari tindakan Percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan

3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.92.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan BERSIH dari perbuatan curang

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

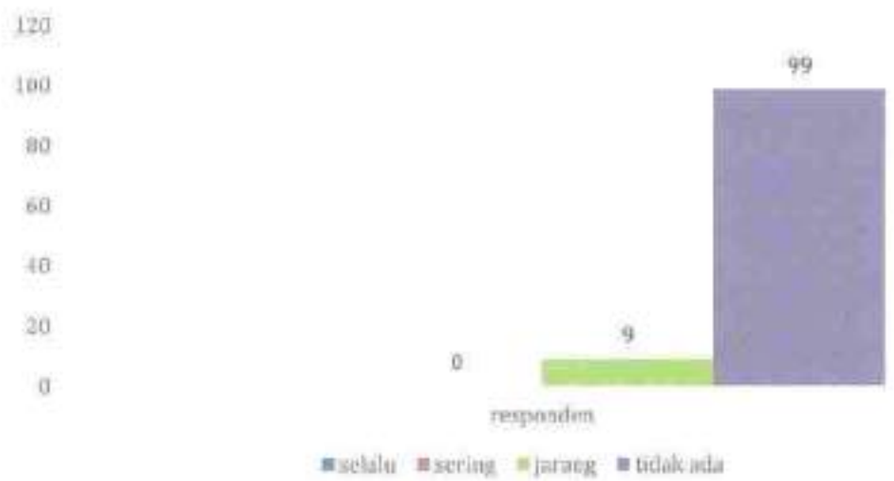

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebesar **3,88.**

Tabel 18.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

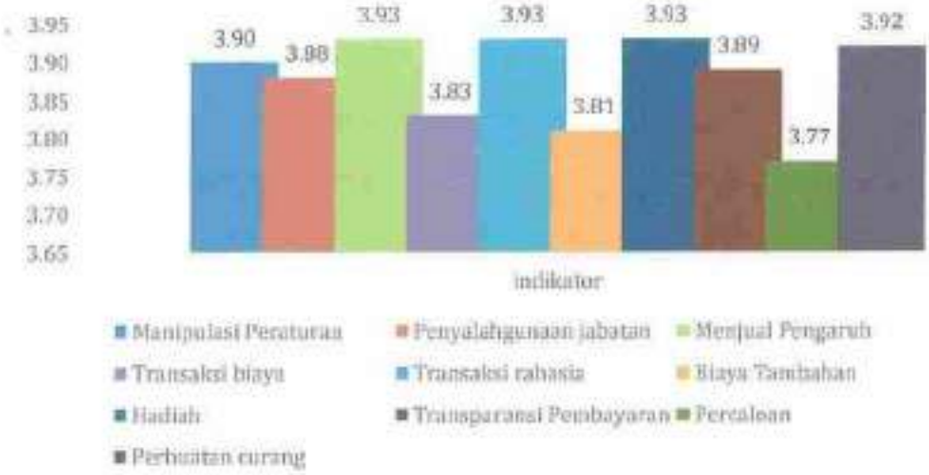

Indeks 3,88 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 96.92 %.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Semakin ditingkatkan pelayanannya
2	Ditingkatkan sarana pendukung lainnya seperti pendingin udara di lobi, pengharum ruangan, dll

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.88 atau** masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,90
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,88
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,93
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,89
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,93
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,81
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.93
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,89
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.77
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,92

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Lhokseumawe bulan Desember 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 96.92 % atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Menjual Pengaruh dan percaloan memiliki indeks yang rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

TAHUN 2019

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : .....
2. Instansi/Perusahaan : .....
3. Umur (Tahun) : .....
4. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
5. Pendidikan terkahir :
   1. Tidak sekolah
   2. SD
   3. SMP/SLTP
   4. SLTA
   5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
   6. Sarjana (S1)
   7. Pasca Sarjana (S2/S3)
6. Pekerjaan Utama :
   1. PNS
   2. TNI/Polri
   3. Pegawai Swasta
   4. Wiraswasta
   5. Petani/Nelayan
   6. Pedagang
   7. Pelajar / Mahasiswa
   8. Lainnya.....

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.

2. Cara pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei						
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		**Selalu**	**Sering**	**Jarang**	**Tidak ada**	**Kode Pengolahan**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eksternal						
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? **(Manipulasi Peraturan)**	1	2	3	4	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? **(Penyalahgunaan Jabatan)**	1	2	3	4	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? **(Menjual Pengaruh)**	1	2	3	4	
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? **(Transaksi Biaya)**	4	3	2	1	
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? **(Biaya Tambahan)**	4	3	2	1	
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? **(Hadiah)**	1	2	3	4	

7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? **(Transparasi Biaya)**	4	3	2	1	
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? **(Percaloan)**	1	2	3	4	
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? **(Perbuatan Curang)**	1	2	3	4	
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? **(Transaksi Rahasia)**	1	2	3	4	

PETUGAS PELAKSANA :

1. **Petugas :**

- Nama :.....
- Tanda Tangan :.....
- Tanggal Pelaksana : .....

2. **Pencacah/Penghitung hasil survei :**

- Nama : .....
- Tanda Tangan : .....
- Tanggal Pelaksana : .....

3. **Pengawas/Pemeriksa :**

- Nama : .....
- Tanda Tangan : .....
- Tanggal Pelaksana : .....

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI JULI S/D DES 2019

Responde	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										KETERANGAN	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4		
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
10	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4		
11	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
12	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
16	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4		
17	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
18	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4		
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
21	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
22	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
24	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4		
25	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4		
26	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4		
27	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
29	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4		
30	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4		
31	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4		
32	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
36	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
40	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4		
41	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
42	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
44	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
47	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4		
48	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4		
49	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4		
50	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
51	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4		
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
54	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
55	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
56	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
59	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4		
60	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4		
61	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
62	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3		
63	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3		
64	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3		
65	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4		

68	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
69	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4		
70	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
71	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
73	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4		
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
75	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4		
76	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4		
77	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4		
78	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4		
79	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3		
80	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4		
81	4	2	4	4	1	4	4	4	4	3		
82	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4		
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
84	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
85	4	1	4	4	4	4	4	3	4	4		
86	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
87	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4		
88	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4		
89	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4		
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
91	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
92	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4		
93	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4		
94	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4		
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
96	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4		
97	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
98	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
101	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4		
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
105	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4		
106	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
107	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
JUMLAH	421	419	424	414	411	424	420	407	423	424		
N. RATA-RATA	3.90	3.88	3.93	3.83	3.81	3.93	3.89	3.77	3.92	3.93	38.77	
												1
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.88	10
												0.1

Keterangan :

Q1 - Q 12	: Unsur-unsur Pertanyaan
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
NRR	: Nilai Rata-rata
NRR Perunsur :	Jlh Nilai perunsur / Jlh Kuisioner yang terisi

IPK : 3,88

Nilai Interval IPK	Nilai Intervensi Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	selalu
1,76-2,50	43,76-62,50	2	sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	tidak pernah

Nilai Indeks:
Total Nilai Persepsi perkumpulan 2
Total Nilai Unsur yang tidak

bobot

Unsur pertanyaan

Bobot NRR tertimbang

No	Unsur Pertanyaan	NRR	Ind
Q1	Manipulasi peraturan	421	97.45
Q2	Penyalahgunaan Jabatan	419	96.99
Q3	Menjual Pengaruh	424	98.15
Q4	Transaksi Biaya	414	95.83
Q5	Biaya Tambahan	411	95.14
Q6	Hadiah	424	98.15
Q7	Transparansi Pembayaran	420	97.22
Q8	Percaloan	407	94.21
Q9	Perbuatan Curang	423	97.92
Q10	Transaksi Rahasia	424	98.15
	-	4187	969.21

1	MANIPULASI PERATURAN	JUMLAH	NILAI	TOTAL	NRR	PERSENTASE
	SELALU	1	1	421	3.90	97.45
	SERING	0	0			
	JARANG	8	24			
	TIDAK ADA	99	396			
2	PENYALAHGUNAAN JABATAN					
	SELALU	1	1	419	3.88	96.99
	SERING	1	2			
	JARANG	8	24			
	TIDAK ADA	98	392			
3	MENJUAL PENGARUH					
	SELALU	0	0	424	3.93	98.15
	SERING	0	0			
	JARANG	8	24			
	TIDAK ADA	100	400			
4	TRANSAKSI BIAYA					
	SELALU	93	372	414	3.83	95.83
	SERING	13	39			
	JARANG	1	2			
	TIDAK ADA	1	1			
5	BIAYA TAMBAHAN					
	SELALU	94	376	411	3.81	95.14
	SERING	10	30			
	JARANG	1	2			
	TIDAK ADA	3	3			
6	HADIAH					
	SELALU	0	0	424	3.93	98.15
	SERING	0	0			
	JARANG	8	24			
	TIDAK ADA	100	400			
7	TRANSPARASI BIAYA					
	SELALU	98	392	420	3.89	97.22
	SERING	8	24			
	JARANG	2	4			
	TIDAK ADA	0	0			
8	PERCALOAN					
	SELALU	0	0	407	3.77	94.21
	SERING	0	0			
	JARANG	25	75			
	TIDAK ADA	83	332			
9	PERBUATAN CURANG					
	SELALU	0	0	423	3.92	97.92
	SERING	0	0			
	JARANG	9	27			
	TIDAK ADA	99	396			
10	TRANSAKSI RAHASIA					
	SELALU	0	0	424	3.93	98.15
	SERING	0	0			
	JARANG	8	24			
	TIDAK ADA	100	400			

96.92

Nilai Interval IPK	Nilai Intervensi Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1.00-1.75	25.00-43.75	1	selalu
1.76-2.50	43.76-62.50	2	sering
2.51-3.25	62.51-81.25	3	jarang
3.26-4.00	81.26-100.00	4	tidak ada